



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD PROVINSI BANTEN**

**TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2024 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan didaerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Februari 2025

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Ruang Lingkup	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
1.4. Tujuan.....	I - 4
1.5. Metode Evaluasi RKPD.....	I - 5
1.6. Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024	II - 1
2.1. Keselarasan Rencana Tujuan dan Sasaran Daerah 2024	II - 1
2.2. Realisasi APBD Triwulan IV 2024	II - 6
BAB III HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.....	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro	III - 1
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024	III - 13
3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	III - 16
3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	III - 25
BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2024.....	IV - 1
4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	IV - 3
4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 7
BAB V PENUTUP.....	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, dan digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah

dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2024. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan III). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 melalui input realisasi kinerja dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulan, dalam hal ditemukan

adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
BAB III	:	EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
BAB IV	:	ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024. Pada tahun pengendalian 2024 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir periodesasinya.

2.1. Keselarasan Rencana Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dokumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan program pembangunan tahun 2024 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen

RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024 RKPD- P
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,1	6,17	5,94	5,67-5,97
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,52	8,51	7,02-7,52
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,59	75,25	73,55	76,02
	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	53,56	63,46	63,46
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803	0,675	0,68
	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,12	7,75	7,75
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	65,54	64,9
	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,15	9,20	9,23
	dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	13,09	13,93	13,93
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,4	74,77	70,54	74,8
		Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,5	20	23,00	23,00
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,18	93,35	93,35

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024 RKPD- P
	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	51,41	56,23	56,23
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	49,28	50,17	50,17
2	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70-5,2	4,81	5,11-5,25	4,8-5,0
		Indeks Williamson	0,625	0,62	0,620	0,620
		Indeks Gini	0,363	0,368	0,349	0,365
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	3,43	4,92	4,92
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	5,82	5,06	5,82
		LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	3,98	3,04	3,04
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	5,1	4,48	4,48
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	0,14	0,80	0,80
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.601	12.303	12.674
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,82	18,00	18,00
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	63,04	63,5
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	145,31	145,31

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024 RKPD- P
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	78,17	71	78,17
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,74	73,16	73,16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,2	77,012	84,30	84,30
		Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	3,2	2-3	2-3
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	3,47	3,74	3,49	3,74
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh

Sumber: RPD 2023-2026 Provinsi Banten

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	29
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Terdapat total program yang diampu oleh perangkat daerah sebanyak 189 Program (program penunjang dihitung 1 ditiap OPD), dan 932 Kegiatan dan 3645 sub kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

2.2. Realisasi APBD Triwulan IV 2024

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2024 direncanakan sebanyak 189 program yang direncanakan dalam APBD. Berikut hasil realisasi APBD Triwulan IV 2024 yaitu Pendapatan Daerah ditargetkan Sebesar Rp12.408.206.036.154, yang meningkat sebesar Rp662.196.630.115 dari target pendapatan pada APBD Murni yaitu sebesar Rp11.746.009.406.039. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.404.001.670.529 atau 99,97% dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp11.866.009.406.039 yang selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan menjadi sebesar Rp12.356.583.363.283. Anggaran Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp11.913.012.429.184 atau sebesar 96,41%. Pembiayaan Daerah APBD Murni dianggarkan sebesar Rp120.000.000.000 dan pada Perubahan APBD TA 2024 ditetapkan menjadi sebesar Rp(51.622.672.871). Pembiayaan Daerah netto terealisasi sebesar Rp(51.622.672.871) atau 100 persen.

Tabel 2.4
Penjabaran Realisasi Keuangan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	APBD Tahun 2024		Realisasi	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	PENDAPATAN	Rp11.746.009.406.039	Rp12.408.206.036.154	Rp12.404.001.670.529	99,97%
2	BELANJA DAERAH	Rp11.866.009.406.039	Rp12.356.583.363.283	Rp11.913.012.429.184	96,41%.
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp120.000.000.000	Rp 51.622.672.871.	Rp 51.622.672.871	100%

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV 2024

Perangkat Daerah	Pagu_Jumlah	Realisasi_Jumlah	
		RP	(%)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.903.505.091.617,00	2.751.576.613.698,48	94,77
DINAS KESEHATAN	1.133.195.072.570,00	1.121.430.699.459,00	98,96
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.088.600.996.397,00	1.039.163.245.195,78	95,46
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	472.168.786.321,00	452.847.375.339,49	95,91
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.419.255.074,00	43.940.131.333,00	96,74
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39.530.359.559,00	36.902.257.216,00	93,35
DINAS SOSIAL	102.263.897.137,00	98.715.913.520,00	96,53
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	94.818.912.257,00	91.859.644.831,00	96,88
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	37.271.978.619,00	36.203.423.866,15	97,13
DINAS KETAHANAN PANGAN	40.634.562.469,00	38.379.913.110,00	94,45
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	146.463.080,00	122.401.000,00	83,57
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	66.385.287.328,00	65.650.429.283,00	98,89
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.058.200.700,00	986.895.701,00	93,26
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.413.054.689,00	31.341.757.509,00	91,08
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.202.794.080,00	7.045.935.964,93	97,82
DINAS PERHUBUNGAN	118.141.592.380,00	111.551.990.171,00	94,42
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	57.742.889.326,00	54.684.357.421,00	94,70
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	29.691.027.949,00	27.476.253.611,00	92,54
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34.760.370.517,00	33.515.709.219,00	96,42
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	121.190.147.086,00	116.968.719.411,00	96,52
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.047.115.300,00	1.015.105.560,00	96,94
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.056.762.000,00	1.923.023.766,00	93,50
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.365.740.000,00	7.032.376.924,00	95,47

Perangkat Daerah	Pagu_Jumlah	Realisasi_Jumlah	
		RP	(%)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	31.216.589.271,00	29.507.473.202,00	94,52
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.980.137.500,00	1.801.306.710,00	90,97
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.389.404.791,00	63.732.305.291,00	97,47
DINAS PARIWISATA	50.580.280.477,00	48.709.880.432,00	96,30
DINAS PERTANIAN	109.229.104.742,00	103.775.644.118,00	95,01
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.489.700.157,00	4.243.000.817,00	94,51
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42.004.876.738,00	40.637.174.386,00	96,74
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.938.019.700,00	8.340.335.776,00	93,31
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.090.073.841,00	37.173.728.457,00	95,10
SEKRETARIAT DAERAH	251.934.466.314,00	235.659.143.463,00	93,54
SEKRETARIAT DPRD	550.000.000.000,00	509.191.759.274,00	92,58
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	52.924.978.924,00	50.590.111.333,00	95,59
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.727.449.390.680,00	3.657.876.891.305,00	98,13
BADAN PENDAPATAN DAERAH	315.795.751.724,00	306.143.826.225,50	96,94
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38.995.711.827,00	37.147.689.795,00	95,26
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	61.573.050.095,00	54.997.220.062,00	89,32
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.309.723.966,00	2.128.022.450,00	92,13
BADAN PENGHUBUNG	11.864.172.800,00	11.269.998.392,00	94,99
INSPEKTORAT	70.784.692.881,00	67.203.054.067,00	94,94
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16
	12.356.583.363.283,00	11.913.012.429.184,30	96,41

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Triwulan IV Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2024

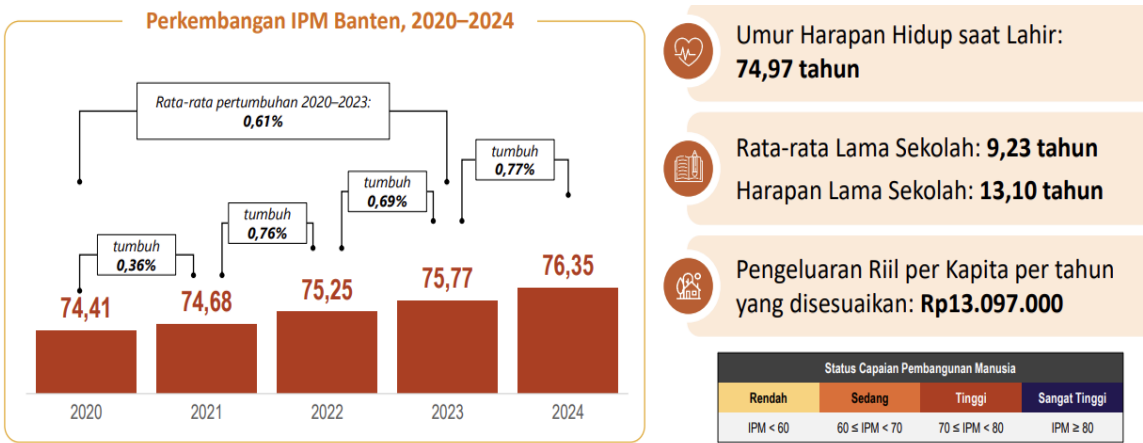
No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,77	76,02	76,35	75,02
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	4,80	4,79	5,03
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	7,02	6,68	4,91
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,17	5,67	5,70	8,57

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Nasional
5	Indeks Gini	Poin	0,368	0,360	0,359	0,381
6	Tingkat Inflasi	Persen	2,9	3,0-4,0	1,88	1,57

Sumber: RKPD 2024, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



sSumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten salah satunya terpresentasikan melalui capaian IPM. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang rilis pada No. 60/12/36/Th.XVIII, 2 Desember 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2024 sangat baik yaitu sebesar 76,35 poin, meningkat sebesar 0,77 poin dari tahun lalu. Capaian kinerja IPM pada tahun 2024 sudah melebihi harapan yang ditargetkan pada dokumen perencanaan sebesar 76,02 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,43%. Capaian kinerja IPM tahun 2024 jika kita lihat sudah mencapai target akhir kinerja RPD yaitu sebesar 74,39 di akhir tahun 2026. Jika dibandingkan capaian Nasional IPM Banten berada di atas nasional sebesar 1,33 poin, IPM nasional sendiri berada di angka sebesar 75,02.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2024 termasuk pada klasifikasi “tinggi”, secara peringkat Banten menempati peringkat ke-7 dengan status IPM tertinggi dari 38 Provinsi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2024 terus meningkat, pada tahun 2024 ditargetkan UHH sebesar 74,82 dan terealisasi 74,97 tahun meningkat 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja UHH pada tahun 2024 sudah melebihi target tercapai sebesar 100,20%. Posisi UHH Banten jika dibandingkan nasional sebesar 74,15 lebih baik 0,82 poin. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2024 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 74 tahun.

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 telah mencapai 13,10 tahun. Realisasi ini naik sebesar 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Target HLS pada dokumen perencanaan 2024 sebesar 13,93 dengan capaian kinerja HLS mencapai 94%. Dengan demikian bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2024, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II

diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

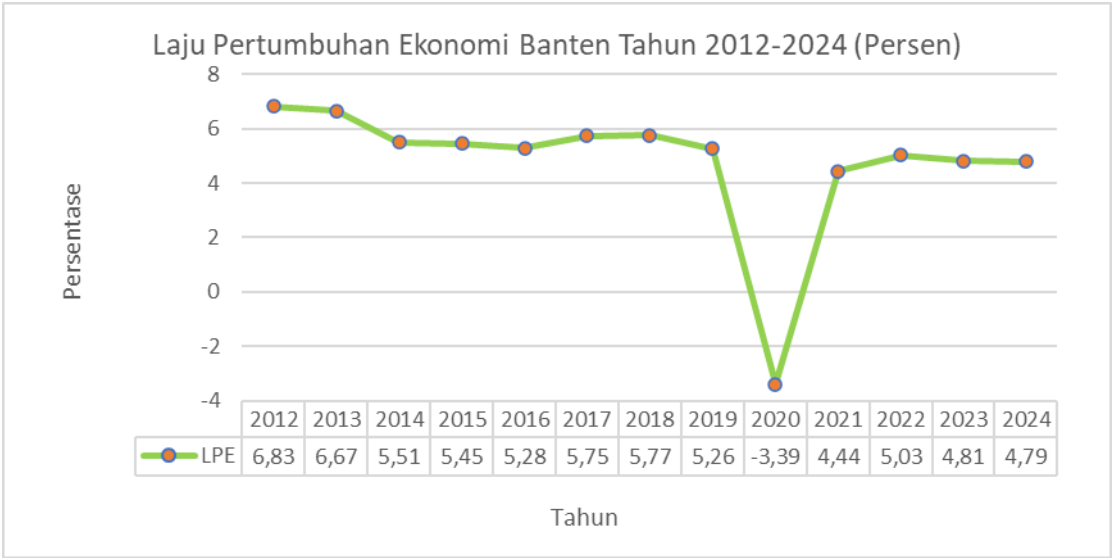
Rata-rata Lama Sekolah di Banten menunjukkan perkembangan positif, RLS Banten pada tahun 2024 telah mencapai 9,23 tahun meningkat 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja RLS pada tahun 2024 telah mencapai target 100 persen atau sesuai target dengan pertumbuhan yang selalu positif. Hal ini artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2024 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 2,7 triliun atau 23,14 persen dari APBD (ketentuan minimal 20 persen); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,16 triliun atau 12,60% dari APBD (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Pada tahun 2024 telah dijalankan penyelesaian pengembangan dan operasional RSUD Cilograng, RSUD Labuan, RSUD Malingping, pengembangan RSUD Banten menjadi RS Pendidikan, pemenuhan pembiayaan kesehatan (JKN) dan pemenuhan SPM Kesehatan.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,7 – 5,2 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 11/02/36/Th. XIX, 5 Februari 2025, realisasi laju Pertumbuhan ekonomi Banten di Tahun 2024 sebesar 4,79 persen. LPE dibandingkan dengan tahun kemarin mengalami pelambatan sebesar 0,02 persen. Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,96 persen naik 0,01

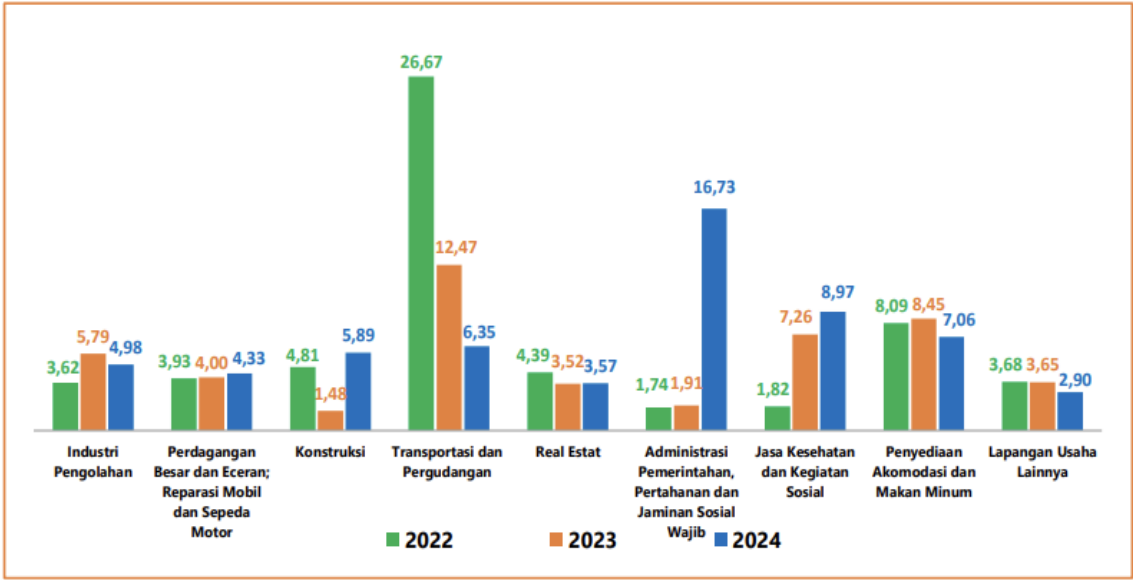
persen dibandingkan tahun lalu dan kontribusi nasional sebesar 3,97. Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen.



Sumber : BPS Provinsi Banten,2024

Gambar 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Banten 2012-2024 (y on y)

Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,35 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,38 persen; Konstruksi sebesar 11,69 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,47 persen; serta Real Estat sebesar 7,72 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 73,61 persen.



Sumber : BPS Provinsi Banten,2024

Gambar 3.4
Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2022-2024

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten, yang pada tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,98 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,33 persen; Konstruksi sebesar 5,89 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,35; serta Real Estat sebesar 3,57 persen.

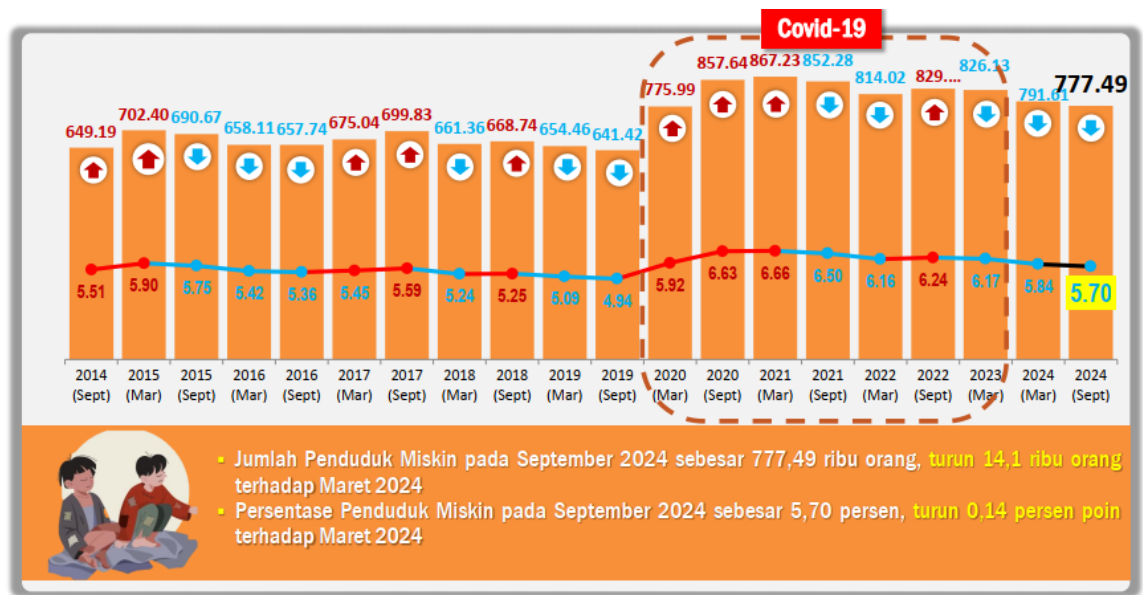
Dari sisi pengeluaran seluruh komponen Pengeluaran mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 13,82 persen disusul komponen Total Net Ekspor yang tumbuh sebesar 11,90 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,83 persen, kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masing-masing tumbuh 4,39 persen dan 2,63 persen.

Secara umum yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Banten adalah investasi. Di mana, nilai investasi meningkat saat ini didorong oleh investasi bangunan dan non bangunan. Investasi bangunan terdorong oleh peningkatan investasi pada proyek kawasan komersil dan perumahan seperti Kawasan PIK2, Serpong, Alam Sutera, BSD dan Maja investasi non bangunan

juga meningkat yang tercermin dari peningkatan impor barang modal yang meningkat 29 persen dari realisasi investasi industri pengolahan yakni PT Lotte Chemical Indonesia yang mulai beroperasi pada awal triwulan II 2025..

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 05/01/36/Th.XIX, 15 Januari 2025 menunjukkan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2024 sebesar 5,70 persen, menurun 0,47 persen terhadap Maret 2023 dan turun 0.14 persen jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 777.490 ribu orang, menurun 48.640 ribu orang terhadap Maret 2023.



Sumber: BPS Banten 2024

Gambar 3.5
Persentase Penduduk Miskin 2014-2024

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,57 persen, turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan pada Maret 2023 diangka 6,0 persen. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,20 persen turun 0.59 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 6,79 persen, Hal lain yang perlu diperhatikan selain dari persentase penduduk miskin adalah Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Pada September 2024 indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,971 pada Maret 2024

menjadi 0,799 pada September 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,247 menjadi 0,154 pada periode yang sama.

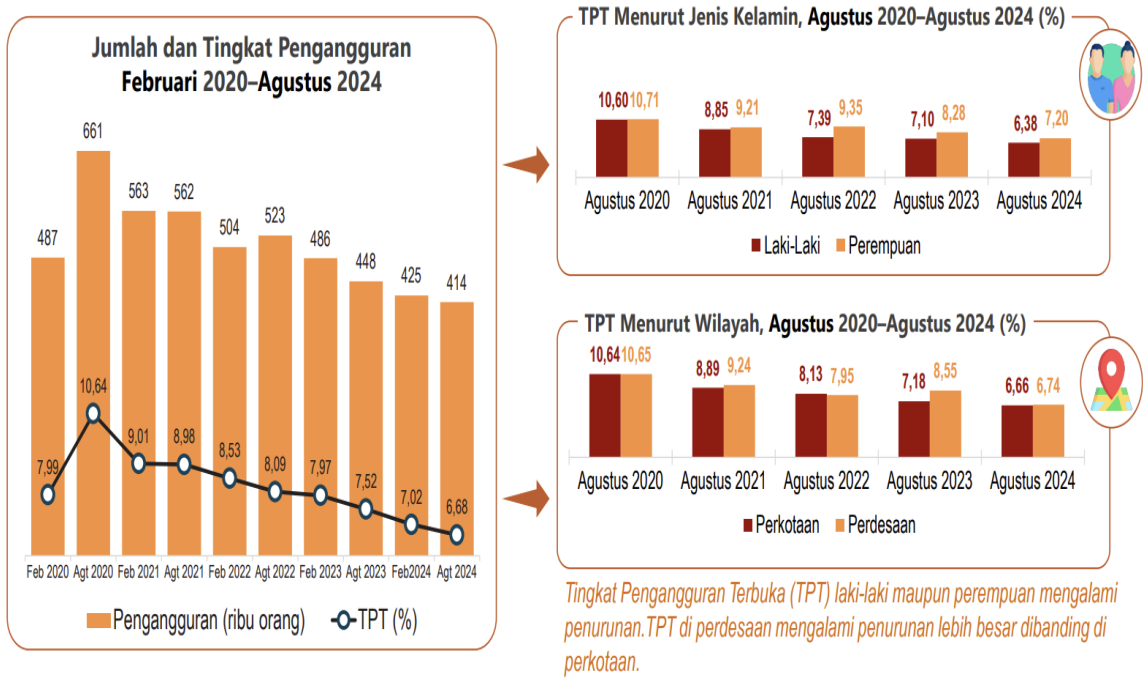
Faktor penurunan Kemiskinan pada tahun 2024 secara umum di Banten antara lain, terjadi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,34 persen, pada periode Maret 2024–September 2024 inflasi umum lebih rendah jika dibandingkan 2 pada periode Maret 2023-september 2023, terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I ke triwulan III tahun 2024 sebesar 4,48 persen. Industri pengolahan baik secara q-to-q dan y-o-y tumbuh secara positif yaitu sebesar 2,26 persen dan 3,40 persen.

Selain itu Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai intervensi yaitu:

1. Adanya kebijakan Kementerian yang terintegrasi anatara Kememko PMK dan Kemendagri adanya kebijakan daerah berupa Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
2. Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan
3. Menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data kemiskinan yang sama yaitu P3KE,
4. Tematik Program dan Kegiatan Pada OPD sesuai tagging nomenklatur SIPD. Kepmen nomor 900.1.15.5-1317,
5. Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar,
6. Pemberian akses dan mutu layanan kesehatan dasar
7. Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat
8. Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah.

3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 55/11/36/Th.XVIII, 5 November 2024. TPT Provinsi Banten pada periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen, menurun 0,84 poin dari tahun sebelumnya yaitu 7,52 persen di Agustus 2023 hal ini menunjukkan kondisi yang baik artinya penangguran semakin menurun. Pada dokumen perencanaan di tahun 2024 TPT ditargetkan sebesar 7,02 persen yang artinya capaian melebihi target yaitu sebesar 104,84%. Namun kondisi TPT Banten tetap perlu diperhatikan karena jika dibandingkan nasional dengan TPT nasional yaitu sebesar 4,91 persen maka TPT kita masih jauh dibawah realisasi nasional.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.6
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6,21 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang dan sebanyak 414,75 ribu orang menganggur. Penurunan pengangguran ini dilihat dari proporsi penduduk di tahun 2024 ini

meningkat terhadap pekerjaan pada kegiatan formal, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Kecenderungan penduduk Banten dari sektor pekerjaan utama kerja sebanyak 51.60% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 22,20%. Perhatian kinerja kedepan masih terus perlu diperhatikan bahwa TPT tertinggi sebesar 11,58% pada jenjang pendidikan SMK, agar terus bersinergi dengan dunia usaha dalam rangka penyiapan skill dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Faktor Pendukung Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah :

1. Melakukan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial
2. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan investasi
3. Memaksimalkan peningkatan skill angkatan kerja melalui BLKI
4. Penyaluran tenaga kerja
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas BLKI
6. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja

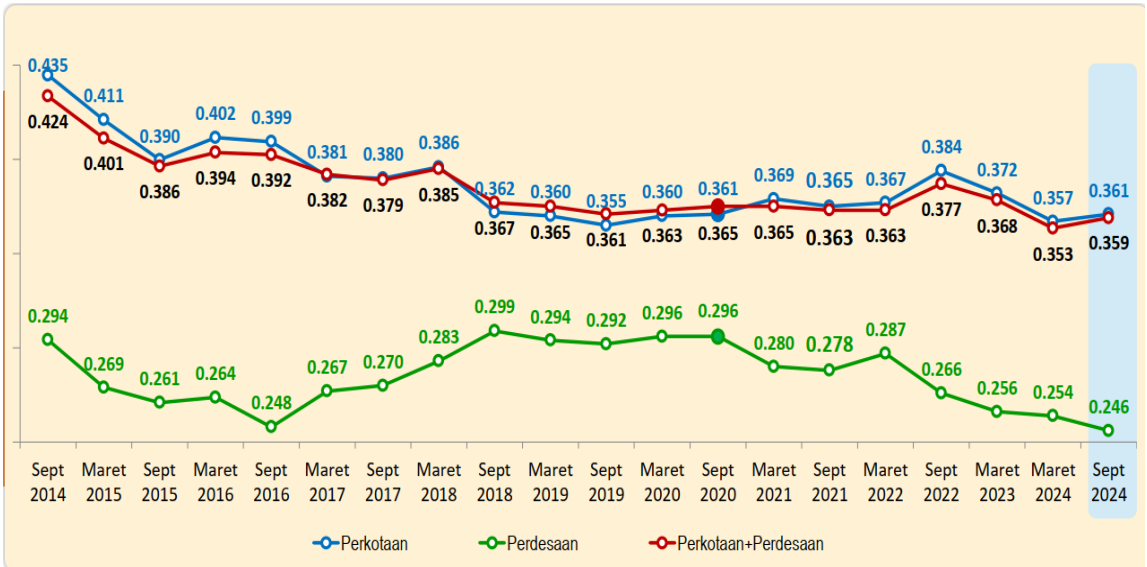
3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. 06/01/36/Th.XIX, 15 Januari 2025, bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2024 mencapai sebesar 0,359 poin yang berarti terdapat penurunan 0,009 poin dibanding periode Maret 2023 yaitu 0,368 poin. Berdasarkan RKPD 20024 gini

ratio ditargetkan 0,360 dan terealisasi 0,359 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,28%.

Tingkat ketimpangan penduduk Banten termasuk Kategori Rendah (Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah > 17 persen). Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2024 mengalami kenaikan 0,70 persen poin, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah turun masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan sebesar 0,57 persen poin

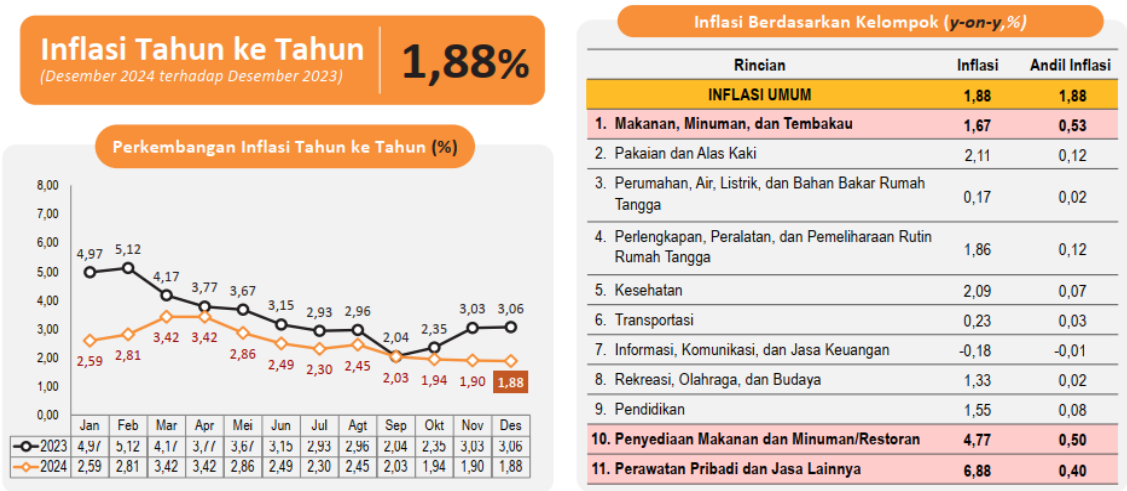


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.7
Gini Ratio tahun 2014-2024 Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.8
Inflasi Provinsi Banten Tahun 2024

Inflasi di Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 1,88 persen angka ini jika dibandingkan tahun lalu sebesar 2,9 persen maka terjadi penurunan 1,02 persen. Harga komoditas yang sangat mempengaruhi inflasi secara tahunan (Y-on-Y) adalah emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, nasi dengan lauk dan minyak goreng. Untuk andil deflasi cabai merah, cabai rawit dan beras.

Secara umum inflasi Banten relatif terkendali walaupun diatas inflasi nasional sebesar 1,57 persen. Kondisi inflasi yang dapat terkendali tak lepas dari sinergisitas segenap *stakeholders* dan fokus kerja pemerintahan Provinsi Banten yang bersandarkan pada reformasi birokrasi berdampak.

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026. Adapun rincian ada dalam tabel dibawah ini;

Tabel.3.3
Realisasi Tujuan dan Sasaran Kinerja Utama Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	ket
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	%	5,67	5,70	99,47	sangat tinggi
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,02	6,68	104,84	sangat tinggi
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,02	76,35	100,43	sangat tinggi
Meningkatnya pelayanan sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	%	7,75	9,60	123,87	sangat tinggi
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,54	66,17	100,96	sangat tinggi
Meningkatkan kualitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63,46	62,20	98,01	sangat tinggi
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,68	0,69	101,47	sangat tinggi
Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,93	13,10	94,04	sangat tinggi
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,23	9,23	100,00	sangat tinggi
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,82	74,97	100,20	sangat tinggi
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	23,00	24,00	95,65	sangat tinggi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	ket
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,35	93,31	99,96	sangat tinggi
Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	56,23	52,49	93,35	sangat tinggi
	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	50,17	53,86	107,35	sangat tinggi
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	4,79	99,79	sangat tinggi
	Indeks Williamson	Nilai	0,62	0,770	75,81	sedang
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4,92	2,63	53,46	rendah
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri	%	5,82	4,98	85,56	tinggi
	LPE Sektor Perdagangan	%	3,98	4,33	108,79	sangat tinggi
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	5,10	10,22	200,39	sangat tinggi
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	%	0,80	0,64	80	tinggi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	3,00	4,00	133,33	sangat tinggi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	ket
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan	Rupiah	12.303.000,00	13.097.000,00	103,34	sangat tinggi
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	18,00	14,82	82,33	tinggi
Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	145,31	128,64	110,98	sangat tinggi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,04	62,54	98,46	sangat tinggi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	78,17	78,17	100,00	sangat tinggi
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK)	Nilai	3,00	2,76	92,00	sangat tinggi
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	3,49	3,74	100,00	sangat tinggi
	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	73,16	69,24	94,64	sangat tinggi
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	84,30	77,93	92,44	sangat tinggi
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Nilai	cukup tangguh	cukup tangguh	100,00	sangat tinggi

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	92,5	107,88	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	64	61,32	95,81	Sangat Tinggi
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,2	11,58	105,08	Sangat Tinggi
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)					
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	50	75	150	Sangat Tinggi
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31	92,31	100	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	80	71,7	110,38	Sangat Tinggi
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,6	4,5	102.17	Sangat Tinggi
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	99,32	99,88	Sangat Tinggi
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	77	100	Sangat Tinggi
Luas Permukiman Kumuh	Ha	160	130	118,31	Sangat Tinggi
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)					
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,1	7,34	120,33	Sangat Tinggi
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	68,54	68,54	100	Sangat Tinggi
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6,1	3,38	55,41	Rendah
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	6,47	6,15	95,05	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	43	88,96	206,88	Sangat Tinggi
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	63,85	62,76	98,29	Sangat Tinggi
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	46,09	44,87	97,35	Sangat Tinggi
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	96	95,18	99,15	Sangat Tinggi
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)					
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,61	95,31	Sangat Tinggi
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,22	69,84	94,1	Sangat Tinggi
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,46	54,32	99,74	Sangat Tinggi
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		82,95	85,46	103,02	Sangat Tinggi
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)					
Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,31	1,98	116,81	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Bidang Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,97	100,51	Sangat Tinggi
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5	2,1	42	Sangat Rendah
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)					
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	62	105,6	170,32	Sangat Tinggi
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72	92,31	102,89	Sangat Tinggi
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80	75,91	94,89	Sangat Tinggi
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	450	440	97,78	Sangat Tinggi
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)					
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	79,25	100,69	Sangat Tinggi
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,9	96,87	105,41	Sangat Tinggi
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,47	102,36	Sangat Tinggi
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	71,85	64,76	90,13	Tinggi
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)					
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,53	0,53	100	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	53,33	102,22	Sangat Tinggi
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70,76	69,87	98,74	Sangat Tinggi
Indek Perlindungan Anak	Nilai	76,02	66,18	87,05	Tinggi
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14	13,28	94,86	Sangat Tinggi
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,3	70,66	101,96	Sangat Tinggi
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)					
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)					
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)					
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	28	28	100	Sangat Tinggi
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister	Persen	5	5	100	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)					
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	24,72	82,29	Tinggi
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73	0,7	95,89	Sangat Tinggi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83	86,17	103,82	Sangat Tinggi
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)					
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	5,25	4,77	109,14	Sangat Tinggi
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	25,5	30,53	119,73	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)					
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	70,01	76,2	108,84	Sangat Tinggi
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	15	10,34	68,93	Sedang

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,99	100	Sangat Tinggi
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	43,03	110,16	Sangat Tinggi
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
Peningkatan Nilai Tukar Nelayan	POIN	104	98,47	94,68	Sangat Tinggi
Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	246.654	193819,67	78,58	Tinggi
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)					
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	21.063.968	22.465.192	106,65	Sangat Tinggi
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,53	12,38	91,5	Sangat Tinggi
BIDANG PERINDUSTRIAN					
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,64	30,35	99,05	Sangat Tinggi
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)					
Produksi Peternakan	Ton	256.390	244.503	95,36	Sangat Tinggi
Produksi Hortikultura	Ton	31.091	47.254	151,98	Sangat Tinggi
Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.154.192	2.362.738	109,68	Sangat Tinggi
Produksi Perkebunan	Ton	52.146	57.854	110,95	Sangat Tinggi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	Sangat Tinggi
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,1	Sangat Tinggi
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	Sangat Tinggi
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,71	99,54	Sangat Tinggi
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	133	133	Sangat Tinggi
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	71,43	71,43	Sedang
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,29	3,46	80,65	Tinggi
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100	91,96	91,96	Sangat Tinggi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
INSPEKTORAT DAERAH					
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	1	100	Sangat Tinggi
Maturitas SPIP	Nilai	3,24	3,4	105,03	Sangat Tinggi
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	15,37	100,39	Sangat Tinggi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	72,76	98,59	Sangat Tinggi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Inovatif	90	Tinggi
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	332,5	330,5	99,4	Sangat Tinggi
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	52,81	101,46	Sangat Tinggi
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61	31,24	144,56	Sangat tinggi
PERENCANAAN					
Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	47	43,35	92,23	Sangat Tinggi
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4	4	100	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	78,96	75,83	96,04	Sangat Tinggi
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	91,67	91,67	Sangat Tinggi

Sumber: Data olahan Bappeda 2024

Sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 19 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024.

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2024 secara ringkasan ada pada tabel 3.5 dan secara terperinci per Perangkat daerah ada dalam lampiran buku hasil evaluasi RKPD Triwulan IV tahun 2024.

Tabel 3.5
Rangkuman Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV-2024

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99,99	131.756,00	2.910.870.831.617,00		97,75	390.187,99	2.614.251.384.310,2	97,76	89,81	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)	100,00	130.481,00	2.900.025.944.805,00		97,89	387.175,99	2.606.971.877.381,7	97,89	89,89	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
2	DINAS KESEHATAN	100,00	3.462,06	1.133.195.072.570,00		94,27	5.839,63	1.010.770.831.240,0	94,27	89,20	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
2.1	DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)	100,00	119,00	621.015.756.713,00		94,63	1.859,00	599.284.115.085,28	94,63	96,50	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
2.2	UPT RSUD BANTEN	100,00	3.189,50	338.537.456.394,00		97,29	3.201,75	240.477.484.094,00	97,29	71,03	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
2.3	UPT RSUD MALINGPING	100,00	109,87	156.885.221.140,00		86,82	555,00	155.843.852.776,00	86,82	99,34	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100,00	3.307,61	1.088.600.996.397,00		87,09	6.583,53	1.005.507.795.727,0	87,09	92,37	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)	100,00	2.526,56	791.027.748.302,00		82,99	3.209,89	715.895.668.802,00	82,99	90,50	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00	2.216,30	472.315.249.401,00		85,14	3.759,95	438.864.738.502,66	85,14	92,92	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	112,12	45.419.255.074,00		99,36	718,01	43.925.083.257,00	99,36	96,71	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00	29.949,00	39.530.359.559,00		89,26	39.157,00	36.912.257.244,00	89,26	93,38	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
7	DINAS SOSIAL	100,00	41.102,00	102.263.897.137,00		68,30	70.962,90	98.066.107.118,84	68,30	95,90	KURANG
7.1	DINAS SOSIAL (UNIT INDUK)	100,00	39.822,00	92.731.185.037,00		66,16	69.575,00	90.196.137.872,00	66,16	97,27	KURANG

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
8	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	100,00	7.895,00	94.818.912.257,00		89,45	34.491,85	97.188.215.772,44	89,45	102,50	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
8.1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (UNIT INDUK)	100,00	6.342,50	64.583.088.844,00		92,56	31.633,75	63.014.838.830,37	92,56	97,57	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	100,00	986,00	45.532.973.399,00		77,28	132,00	44.280.265.203,00	77,28	97,25	BUTUH PERBAIKAN
9.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN	100,00	776,00	43.960.170.399,00		77,32	128,00	42.790.083.138,00	77,32	97,34	BUTUH PERBAIKAN

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
	DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)										
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	100,00	375,00	40.634.562.469,00		93,31	1.015,00	33.205.200.244,00	93,31	81,72	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
10.1	DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)	100,00	345,00	40.205.892.469,00		93,50	926,00	32.871.583.801,00	93,50	81,76	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100,00	1.358,50	70.874.987.485,00		59,81	3.042,66	58.091.212.477,41	59,81	81,96	BAIK
11.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)	100,00	831,00	61.576.778.468,00		57,37	2.145,00	51.553.710.448,18	57,37	83,72	BAIK
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	314,00	34.413.054.689,00		90,05	3.940,00	31.285.405.335,02	90,05	90,91	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
13	DINAS PERHUBUNGAN	100,00	1.521,76	118.141.592.380,00		87,49	3.002,00	39.617.300.555,87	87,49	33,53	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
13.1	DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)	100,00	1.497,00	117.343.038.380,00		87,41	2.874,00	39.413.931.778,87	87,41	33,59	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100,00	341,70	60.846.766.626,00		98,13	1.093,00	57.622.486.747,00	98,13	94,70	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00	2.365,00	29.691.027.949,00		95,93	10.385,00	26.794.322.274,00	95,93	90,24	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,00	784,20	34.760.370.517,00		96,27	2.770,10	25.515.335.138,31	96,27	73,40	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100,00	380,50	121.190.147.086,00		99,82	1.485,50	116.968.719.411,00	99,82	96,52	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
17.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (UNIT INDUK)	100,00	338,00	110.726.973.166,00		99,80	1.337,50	107.301.684.649,00	99,80	96,91	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00	27.204,50	33.196.726.771,00		97,35	96.933,64	28.395.204.285,26	97,35	85,54	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	529,00	65.389.404.791,00		83,85	2.882,80	51.749.750.480,00	83,85	79,14	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
19.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)	100,00	443,25	41.558.453.510,00		94,22	1.726,00	35.791.882.491,00	94,22	86,12	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
20	DINAS PARIWISATA	100,00	1.013,00	50.580.280.477,00		99,94	9.769,00	46.851.099.684,00	99,94	92,63	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
21	DINAS PERTANIAN	100,00	3.989,70	109.229.104.742,00		99,03	4.598,45	104.050.738.402,00	99,03	95,26	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
21.1	DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)	100,00	1.422,70	91.106.557.392,00		101,09	1.916,65	89.607.885.161,00	101,09	98,36	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100,00	3.460,25	42.004.876.738,00		93,25	4.545,15	39.042.953.216,00	93,25	92,95	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100,00	1.147,00	48.028.093.541,00		95,20	13.899.767,69	45.542.514.233,00	95,20	94,82	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24	SEKRETARIAT DAERAH	100,00	425,12	251.934.466.314,00		93,43	3.813,00	222.910.388.609,25	93,43	88,48	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24.1	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100,00	20,00	25.354.482.730,00		55,47	37,00	16.133.627.671,72	55,47	63,63	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24.2	BIRO HUKUM	100,00	39,00	2.788.197.136,00		99,10	195,00	2.551.667.954,00	99,10	91,52	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24.3	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	100,00	90,00	2.582.212.902,00		226,23	398,00	2.320.130.347,01	226,23	89,85	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
24.4	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	100,00	100,12	203.259.941.146,00		96,06	1.008,00	186.440.829.481,00	96,06	91,73	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24.5	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	100,00	29,00	3.728.943.760,00		93,04	172,00	3.321.632.598,00	93,04	89,08	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24.6	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100,00	60,00	4.181.549.090,00		94,85	1.585,00	2.745.159.309,52	94,85	65,65	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
24.7	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	100,00	87,00	10.039.139.550,00		99,80	418,00	9.397.341.248,00	99,80	93,61	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
25	SEKRETARIAT DPRD	100,00	575,00	550.000.000.000,00		98,85	3.166,00	404.252.694.403,00	98,85	73,50	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
26	BADAN PERENCANAAN	100,00	553,25	55.234.702.890,00		98,36	1.096,00	52.718.133.783,00	98,36	95,44	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
	PEMBANGUNAN DAERAH										
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,00	487,00	3.727.449.390.680,00		97,35	830,00	3.657.876.891.305,0	97,35	98,13	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100,00	3.711,55	315.795.751.724,00		97,88	14.633,00	306.299.682.966,50	97,88	96,99	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
28.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)	100,00	3.025,00	265.533.496.289,00		98,70	12.300,00	258.744.425.451,00	98,70	97,44	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100,00	863,00	38.995.711.827,00		89,67	2.117,00	31.497.548.574,19	89,67	80,77	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00	1.501,00	61.573.050.095,00		95,95	6.862,00	392.249.712.850,25	95,95	637,05	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

No	SKPD/Sub Unit	Target Tahunan				Realisasi s/d Triwulan IV			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinarja Organisasi
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	3	4	5	6		15	16	17	18	19	20
31	BADAN PENGHUBUNG	100,00	48,00	11.864.172.800,00		97,07	224,00	10.747.172.929,00	97,07	90,59	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
32	INSPEKTORAT	100,00	199,00	70.784.692.881,00		90,33	404,00	58.545.862.105,82	90,33	82,71	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00	589,00	481.422.880.400,00		98,69	3.942,00	472.550.652.924,00	98,69	98,16	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
JUMLAH		100,00	900.107,21	12.356.583.363.283,00		94,99	14.634.149,85	11.704.147.661.308,17	94,99	94,72	

BAB IV

ANALISIS, PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2024.

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026. Secara Umum, Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah Tercapai Dengan Kategori :

- **Sangat Tinggi Sebanyak 28 Indikator,**
- **Kategori Tinggi 3 Indikator**
- **Kategori Sedang 1 Indikator**
- **Kategori Rendah 1 Indikator.**
- **Kategori Sangat Rendah 0 Indikator**

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten tahun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Pencapaian indikator pada tujuan **Pertama Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia** ditunjukkan dengan 14 indikator, dari 14 indikator yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar **101,04 persen**. Dimana capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran Meningkatkan pelayanan sosial dengan indikator Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial capaian kinerja sebesar 123,87 persen.

Pencapaian indikator pada **tujuan Kedua Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi** ditunjukkan dengan 10 indikator, capaian kinerja pada misi Kedua sebesar 104,07 persen. Capaian kinerja tertinggi pertumbuhan sektor pariwisata dengan capaian sebesar 200,39.

Pencapaian indikator pada **tujuan Ketiga Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan**

ditunjukkan oleh ketercapaian 3 indikator indikator kinerja daerah, rata-rata capaian kinerja pada misi ini sebesar 97,25 persen. Capaian kinerja tertinggi adalah Indeks Risiko bencana sebesar 110,98 persen.

Pencapaian indikator pada tujuan **Keempat Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa** ditopang oleh 6 (enam) indikator, rata-rata capaian kinerja pada misi 4 ini sebesar 96,51 persen. Capaian kinerja tertinggi indeks persepsi kualitas pelayanan public, Indeks reformasi birokrasi dan indeks ketahanan nasional dengan capaian sebesar 100 persen.

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang menjadi prioritas pada Pemerintah Provinsi Banten yaitu pada **Bidang pendidikan** membangun sekolah baru, membangun ruang kelas baru, membangun laboratorium dan membangun fasilitas pendidikan lainnya. Pada **Bidang Kesehatan** membangun Rumah Sakit Labuan dan Rumah Sakit Cilograng, melengkapi peralatan medis terkini di RS Banten dan RS Malingping, Penguatan Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Jaminan sosial Kesehatan melalui BPJS, penguatan program dalam rangka penurunan angka stunting. Pada **Bidang Infrastruktur** Pembangunan jalan baru 26,39 Km, membangun rumah layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi. Pada **Bidang Ekonomi** penguatan pengendalian inflasi, peningkatan realisasi investasi, penguatan gerakan pangan murah dan stabilisasi harga komoditas sembako. Pada **Bidang Sosial** menyalurkan bantuan sosial, menyalurkan bantuan keuangan dana desa, bantuan jaminan sosial keluarga, penguatan data Administrasi kependudukan (Adminduk), penguatan penurunan kemiskinan ekstrem. Pada **Bidang Tata Kelola Pemerintahan** menguatkan pengawasan pemerintah melalui SPIP terintegrasi, kerjasama dengan Kejati dan KPK dalam pencegahan korupsi, penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui RB general dan RB tematik serta penguatan digitalisasi melalui peningkatan SPBE.

Tabel 4.1
Kinerja Rendah dan Sedang pada Tujuan dan Sasaran Daerah
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Targe t Tahu n 2024	Realis asi	Capai an	ketera ngan
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	4,79	99,79	sangat tinggi
	Indeks Williamson	Nilai	0,62	0,770	75,81	sedan g
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4,92	2,63	53,46	renda h

Capaian kinerja rendah adalah indikator nilai PMTB, PMTB pada tahun 2024 pertumbuhannya lebih sedikit dibandingkan 2023, hal-hal yang mempengaruhi nilai PMTB didorong oleh pertumbuhan barang modal, seperti mesin, kendaraan, bangunan, dan konstruksi lainnya.

Pada tahun 2024 banyak Proyek Strategis Nasional yang telah selesai di 2023 sehingga Pembangunan infrastruktur lebih sedikit dibanding tahun 2023, namun aktivitas belanja modal Pemerintah turut menjaga kinerja positif investasi. Sektor swasta juga turut andil mendorong investasi di tahun 2024 ditunjukkan dengan realisasi PMA dan PMDN yang mampu mencapai 105 T, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya 103 T. Kondisi infrastruktur yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik yang terjaga menjadi faktor krusial untuk menjaga keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi dan menjaga PMTB.

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapan Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah TA. 2024

Uraian	Jumlah Indikator	Kriteria				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	22	0	0	1	0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30	26	3	0	0	1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	11	1	1	0	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	12	10	1	1	0	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	3	0	0	0	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8	6	1	0	0	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	2	0	0	0	0
TOTAL	91	81	6	2	1	1

Tabel.4.3

Penjelasan Kinerja Rendah pada Perangkat Daerah

Level Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	capaian	Keterangan	Penjelasan
DINAS PUPR	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	6,1	3,38	55,41	Rendah	• Penyediaan SPAM Regional, SPALD Regional dan Fasilitas Persampahan Regional dihitung berdasarkan progres pekerjaan dari seluruh tahapan yang diperlukan dalam membangun fasilitas tersebut yaitu sebanyak 7 tahapan. Adapun progres yang telah dilakukan : •1. SPAM telah melalui 6 tahapan pada SPAM Sindangheula dan Karian Timur •2. SPAL Regional baru melalui 1 tahapan • 3. Fasilitas persampahan di Provinsi Banten telah melalui 4 tahapan - akan menjadi prioritas pada renstra kedepan yaitu : •1. Pembangunan IPAL Regional •2. Pembangunan TPA/TPST •3. Beroperasinya SPAM Regional Meskipun demikian pada infrastruktur fisik lainnya di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Banten dari total panjang jalan kewenangan Provinsi Banten sepanjang 856,993 Km, kondisi jalan mantap sudah mencapai 816,260 Km,

Level Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	capaian	Keterangan	Penjelasan
						Sedangkan untuk kondisi jembatan dari total panjang jembatan 8.520,68 Meter, kondisi jembatan mantap sepanjang 7.502,46 Meter, Luas area irigasi sebesar 29.221 ha terlayani sebesar 18.338 ha
DINDIKBUD	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	5	2,1	42	Sangat Rendah	Indeks Pembangunan kebudayaan dari 3 tahun ke belakang semakin meningkat, tahun 2021 sebesar 47,47, 2022 sebesar 51,41 poin dan 2023 sebesar 52,49 poin Karena indikator ini di hitung berdasarkan persentase peningkatan dari tahun 2022-2023 sehingga tidak mencapai target pertumbuhannya, namun demikian nilai indeks kebudayaan semakin naik yang artinya pemajuan kebudayaan di Banten semakin baik.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan capaian keuangan, berikut hasil realisasi APBD TW IV 2024 yaitu dari target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp12.408.206.036.154,00 terealisasi sebesar Rp12.404.001.670.529,00 atau sebesar 99,97 persen. Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp12.356.583.363.283,00 dengan realisasi sebesar Rp11.913.012.429.184,00 atau Sebesar 96,41 persen. Selanjutnya Pembiayaan Daerah yang pada Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp86.875.060.165,00 terealisasi sebesar Rp86.875.060.165,00 atau 100 persen. Kinerja keuangan OPD yang dibawah 90% ada 2 OPD yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Capaian 89% Dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dengan 83,57%, sehingga total keseluruhan untuk realisasi belanja Perangkat Daerah mencapai 96,41%.

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada triwulan IV secara umum disampaikan permasalahan dan tindaklanjut yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait Indikator Program yang rendah dan sangat rendah :

MISI	JUMLAH INDIKATOR	KRITERIA					PENANGGUNG JAWAB KINERJA
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	87	78	6	0	1	2	GUBERNUR, SEKDA, ASDA 3DINDIK, PUPR, DINKES, PRKP, DINSOS, BPBD, SATPOL PP
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	94	81	6	3	2	2	DINDIK, DISPORA, KETAPANG, KOMINFO, DINKOPUMKM, DLHK, DPMD, DP3AKKB, DPMPTSP, DISHUB, PERPUSDA NAKER
URUSAN PILIHAN	77	62	6	2	5	2	DESDEM, DKP, DLHK, DISPAR, DISPERINDAG, DISTAN
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	51	50	1	0	0	0	BKD, BAPENDA, BPKAD, BPSDM, BADAN PENGHUBUNG, BAPPEDA
PENGAWASAN PEMERINTAHAN	4	4	0	0	0	0	INSPEKTORAT
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	30	27	3	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN UMUM	5	4	0	1	0	0	KESBANGPOL
TOTAL INDIKATOR	348	306	22	6	8	6	

Penjelasan kinerja Program yang rendah dan sangat rendah yaitu

PD	Level Kinerja	Indikator	Target	realisasi	capaian	Predikat kinerja	Penjelasan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	5,00	2,89	57,80	Rendah	Beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga cabe merah disebabkan minimnya stok dari para petani akibat gagal panen serta banyak petani tak bisa melakukan pemeliharaan tanaman akibat perubahan iklim. Lonjakan harga daging ayam ras dipicu Tingginya permintaan yang menyebabkan stok daging ayam ras menipis, Tingginya biaya transportasi, naiknya harga ayam hidup dan harga pakan ayam. Harga minyak mengalami kenaikan karena kenaikan harga minyak mentah dunia termasuk minyak sawit.
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	77,49	41,28	53,27	Rendah	Persentase kinerja realisasi pupuk kurang tepat menjadi indikator kinerja program tersebut. Pada periode Januari s.d 28 November 2024, realisasi distribusi pupuk subsidi dari gudang ke distirbutor Provinsi Banten berjumlah 48.022 Ton (Urea) dan 36.434 Ton (NPK). Alokasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 berjumlah 164.633 Ton yang terdiri dari 88.520 Ton Pupuk Urea dan 76.113 Ton Pupuk NPK. Pada periode Renstra periode berikutnya, indikator akan disesuaikan menjadi Realisasi Kinerja Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.

PD	Level Kinerja	Indikator	Target	realisasi	capaian	Predikat kinerja	Penjelasan
	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (Persen)	27,00	13,61	50,41	Rendah	Nilai ekspor non migas Jan-Okt 2024 dipengaruhi oleh turunnya ekspor produk alas kaki mencapai -24,29%, besi dan baja -20,73% serta plastik dan barang dari plastik -10,60%. Pada periode Renstra periode berikutnya, indikator akan disesuaikan menjadi Realisasi Kinerja Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (Persen)	8,80	5,70	64,77	Rendah	Belum semua kab/kota memiliki dokumen RTK 2. SDM di Kab/Kota belum semua mengikuti terkait BImtek Penyusunan RTKD Pada periode berikutnya akan dilakukan poendampingan dalam penyusunan RTK Kab/Kota. 2. akan dilakukan FGD terkait dengan Bimtek Penyusunan RTKD.
	Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial (%)	4,48	2,49	55,58	Rendah	masih Rendahnya kesadaran perusahaan Peraturan dan Perjanjian Kerja Bersama 2. di beberapa perusahaan belum terbantuknya LKS Bipartit 3. Komunikasin dan koordinasi belum maksimal Kedepan melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan.

PD	Level Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat kinerja	Penjelasan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	130.388,00	77.395,26	59,36	RENDAH	target perikanan tangkap tidak tercapai, realisasi 59,36% karena masih tingginya penggunaan alat tangkap yang dilarang sehingga hasil tangkapan tidak bisa tercatat di pelabuhan perikanan dan area penangkapan semakin jauh dari pantai sementara perahu nelayan ukurannya masih dibawah standar penangkapan di laut bebas pemberian bantuan alat tangkap dan upaya peningkatan jumlah ikan di sekitar pantai dengan peletakan fish apartemen
DINAS PARIWISATA	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rupiah)	5.248.739,00	3.172.274,00	60,44	RENDAH	Rata - rata pengeluaran wisatawan rendah disebabkan adanya faktor cuaca ekstrem dan adanya pengurangan daya beli di masyarakat sehingga wisatawan tidak banyak mengeluarkan pengeluaran pada saat berkunjung di Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten akan intens berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait informasi prakiraan cuaca agar kedepannya aktivitas kegiatan kepariwisataan dapat dikondisikan dengan baik selain itu untuk membantu peningkatan daya beli Dinas Pariwisata akan berkoodinasi dengan pihak BI guna mengantisipasi adanya inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli wisatawan

PD	Level Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat kinerja	Penjelasan
DINAS PUPR	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan regional (persen)	0,43	0,25	58,14	RENDAH	penyediaan fasilitas persampahan regional di provinsi banten telah melalui 4 tahapan dari 7 tahapan yang harus dilalui. Dalam proses penyelenggaraan fasilitas Persampahan Regional terdapat beberapa tahapan yang harus di lalui yaitu terdiri dari : 1.Penyusunan Dokumen RISPAH 2.Penetapan Jakstrada RISPAH 3.DPPT 4.Dokumen Perencanaan 5.Kelembagaan 6.Pembangunan Fisik 7.Operasional Fasilitas Persampahan (TPA/TPST Regional/dsb) *Berdasarkan tahap tersebut, penyediaan fasilitas persampahan Regional di Provinsi Banten telah melalui 4 tahapan yaitu Penyusunan Dokumen RISPAH dan Reviu Dokumen RISPAH, Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

PD	Level Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat kinerja	Penjelasan
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	Presentase relokasi rumah terdampak program provinsi (persen)	50,00	25,00	50,00	SANGAT RENDAH	pada relokasi rumah yang terdampak program pemerintah diselesaikan dengan ganti kerugian (uang tunai) sehingga tidak ada rumah yang perlu direlokasi. kegiatan ini dilakukan dengan pendataan dan identifikasi. pada perencanaan selanjutnya indikator relokasi rumah menjadi satu bagian dengan indikator penyediaan rumah bagi korban bencana
DINAS PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung (persen)	7,87	1,31	16,65	SANGAT RENDAH	dari 7 tahapan yang harus dilalu untuk penyediaan ipald regional yang tersambung, baru dilakukan 1 tahapan. Pada periode berikutnya akan terus dilaksanakan dan fokus
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14,00	1,00	7,14	SANGAT RENDAH	Target Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati belum tercapai karena dokumen rencana induk pengelolaan kehati belum ada, belum adanya sarana prasarana pengellaaan kehati Akan dilakukan penyusunan Dokumen RIP dan Penyedian sarana prasarana kehati
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (%)	20,00	5,00	25,00	SANGAT RENDAH	Target tidak tercapai. Target kunjungan kearsipan melalui JIKN tahun 2024 hanya tercapai sebanyak 25.885 dari target 78.512 pengguna dikarenakan aplikasi JIKN masih dalam proses migrasi, sehingga tidak bisa menampilkan data kunjungan pada kurun waktu Mei s.d Desember 2024. Berkoordinasi dengan ANRI selaku pemegang otorisasi aplikasi JIKN terkait percepatan migrasi aplikasi

PD	Level Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat kinerja	Penjelasan
DINAS ESDM	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) (Rumah Tangga Sasaran,Â (RTS))	17.000,00	3.200,00	18,82	SANGAT RENDAH	Target 2024 sebesar 17.000 RTS dengan pembagian 8.500 dibiayai oleh APBd dan 8.500 oleh APBN, realisasi RTS APBD sebesar 8.200 RTS (96,47%), realisasi RTS APBN sebesar 3.707 RTS (43,61%) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar target pemasangan RTS dari APBN bisa terpenuhi dan tetap memenuhi target RTS dari APBD
DINAS PERTANIAN	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (Persen)	95,00	17,00	17,89	SANGAT RENDAH	

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada triwulan IV secara umum Kinerja baik di Tingkat Pemerintah Daerah maupun di Perangkat Daerah Sebagian besar memenuhi kriteria Sangat tinggi dan tinggi.

Urgensi pengendalian kinerja adalah bagaimana Perangkat daerah dari kinerja yang dilakukan di kegiatan dan sub kegiatan dapat mendukung penuh pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah dan tercapainya Tujuan Daerah. Pada TW IV ini yang perlu di fokuskan di tahun mendatang adalah pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Dimana hasil TW IV menunjukkan kinerja pelambatan dibanding tahun sebelumnya. Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional juga menunjukkan capaian kinerja rendah yang perlu di fokuskan untuk perbaikan tahun mendatang, selain itu ada juga Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan yang pertumbuhannya perlu dipercepat walaupun secara indeks mengalami kenaikan.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan

kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025